

BAB IV

ANALISIS

KEBANGKITAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL DI INDONESIA

4.1 Analisis Dinamika Respon Warganet Terhadap Kenaikan Tarif Permi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Ruang Publik Digital

Presiden Jokowi telah menaikkan iuran BPJS pada 5 Mei 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut rinciannya:

1. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000 dari Rp 80.000
2. Iuran peserta mandiri kelas II juga naik dari Rp 100.000 dari Rp 51.000
3. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Pada kelas III pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga dibayarkan tetap 25.500. Namun pada tahun 2021 subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000 sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah sebesar Rp 35.000.

Sebelumnya pada tahun 2019 Presiden Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan Kesehatan. Namun Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut.

Kenaikan tersebut mendapat banyak sorotan netizen di semua platform media mulai dari media sosial Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram hingga media

daring dengan total 115.599 percakapan. Dari seluruh percakapan volume yang paling besar terjadi di Twitter dengan total 101.745 percakapan.

Terkait dengan dinamika respon warganet terhadap kenaikan tarif premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di ruang publik digital khususnya platform media sosial Twitter, peneliti melakukan analisis media sosial. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat pencari yang disediakan secara gratis oleh Drone Emprit (Media Kernel Indonesia). Dari seluruh percakapan di Twitter, penelitian ini menemukan sentimen negatif dari warganet yang muncul dengan persentase lebih besar daripada mereka yang memiliki sentimen positif. Periode analisa dari tanggal 5 Mei hingga 25 Mei 2020.

Tabel 4.1
Periode Analisis

NO.	Periode Analisis	Sentimen Positif	Sentimen Negatif	Jumlah Percakapan
1.	5-13 Mei 2020	54%	42%	21,396
2.	14-25 Mei 2020	44%	50%	80,349
3.	5-25 Mei 2020	46%	48%	101,745

Dari tiga periode yang dianalisis terdapat dinamika respon warganet yang patut dicatat. Pada periode pertama pada tanggal 5-13 Mei 2020 adalah periode ketika Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan baru saja diputuskan, dari situ mulai muncul perbincangan oleh warganet di platform media sosial termasuk Twitter. Hasil dari alat pencari Drone Emprit terdapat sebanyak 21 ribu percakapan di Twitter

dengan sentimen negatif 42% dan positif 54%, sedangkan netral 4%. Hal tersebut menandakan hampir separuh dari 21 ribu orang menolak adanya kenaikan tarif premi BPJS tersebut. Lalu muncul pemberitaan di media-media mengenai kenaikan BPJS dan viral menjadi *headline* contohnya Kompas.com dan DetikNews yang mengakibatkan perubahan reaksi publik pada periode ke II tanggal 14-25 Mei 2020. Percakapan warganet pada periode II ini mengalami lonjakan yg cukup tinggi, semula 21 ribu naik menjadi 80 ribu percakapan. Seiringan dengan percakapan yang mengalami kenaikan, sentiment negatifnya juga mengalami kenaikan menjadi 50% dan sentiment positifnya turun menjadi 44%. Dalam hal ini tampak bahwa pemberitaan media daring menjadikan topik kenaikan BPJS sebagai *headline* ikut membawa pengaruh pada lonjakan sentimen negatif. Media arus utama secara umum memiliki sentimen negatif pada kenaikan BPJS ini.

Periode ke III merupakan periode yang terpanjang dan merupakan penggabungan periode I dan II yaitu dimulai dari tanggal 5-25 Mei 2020. Jika digabungkan semua terdapat 101,745 percakapan warganet di Twitter. Pada periode ini sentimen negatif lebih besar yaitu mencapai 48% sedangkan positifnya 46%. Hampir separuh warganet menunjukkan sentimen negatif terhadap kenaikan BPJS ini. Hal tersebut menandakan bahwa mayoritas warganet menolak kenaikan BPJS.

Sedangkan dari sisi analisis emosi, tampak emosi yang paling besar ditunjukkan terhadap kenaikan BPJS adalah *trust*. Emosi kepercayaan yang ditunjukkan mencapai 5.800 ribu. Volume *trust* yang tinggi ini juga dibarengi dengan

sentiment negatif dari warganet. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pada segi *distrust* terhadap pemerintah.

Tweet dari akun bernama CNNIndonesia adalah akun yang paling banyak diretweet yaitu dengan judul “Iuran BPJS Naik Lagi, Masyarakat Merasa Kena Prank Jokowi” ini 2519kali di retweet. Setelah itu urutan kedua ada akun bernama @prastow yang diretweet sebanyak 1748: “Selamat sore teman2.... Kita ngobrolin #BPJS dan polemic kenaikan iuran ya? Gimana sih Pemerintah ini, jelas sdh ada Putusan MA kok mas”. Selain itu ada tweet dari @Amien_Rais direrweet sebanyak 1678 kali: Saudaraku, Ini soal kepemimpinan. Kok tega ya pada rakyat sendiri? Dalam keadaan begini masih menaikkan iuran BPJS Kes....”. akun bernama @Azamizzulhaq juga berkomentar: “Terimakasih Atas konsistensinya. Iuran BPJS Kesehatan: Dinaikkan Jokowi, Dibatalkan MA, Kini Dinaikkan Lagi”. Ini adalah contoh retweet yang narasinya merefleksikan sentiment negative.

Selain itu kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal tersebut terlihat dari sisi emosi yang menonjol dari percakapan warganet yaitu ketidakpercayaan (*distrust*). Terdapat 5.800 unggahan terkait ketidakpercayaan tersebut. Kebijakan ini justru menerbitkan *distrust* yang semakin tinggi pada pemerintah.

Pada sisi narasi menunjukkan bahwa dapat diambil makna bahwa pertanyaan utama dari publik adalah berkisar pada persoalan: *Pertama*, inkonsistensi yang terjadi karena sebelumnya pada akhir Desember 2019 iuran BPJS dinaikkan melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019, namun per 1 April dibatalkan dengan putusan Mahkamah

Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020. *Kedua*, “*timing*” kenaikan tarif yang beriringan dengan pandemic covid19. Kenaikan BPJS ini dirasa tidak tepat mengingat kita tengah dilanda pandemic Covid19 meskipun kenaikan hanya ditujukan kepada kelas I dan II namun kelompok ini juga terkena imbas ekonomi karena kondisi pandemic Covid19. *Ketiga*, kekecewaan public yang mengharapan Jokowi untuk tidak mengambil kebijakan seperti ini.

Selain itu muncul tagar# bernada menyerang pemerintah pada percakapan kenaikan BPJS Kesehatan di Twitter, tagar-tagar itu menggambarkan keresahan warganet. Diantaranya #IstanaMesinKapitalis, #MembebaniRakyat, #MerakyatTapiBoong, #BPJSNAIKLAGI.

Pada analisis bot menunjukkan bahwa mayoritas akun yang berpartisipasi pada percakapan di media sosial Twitter yang membahas mengenai kenaikan tarif BPJS kesehatan bukanlah akun robot. Sedangkan akun yang berwarna merah menunjukkan akun yang digunakan oleh robot. Jika semakin kecil nilai akunnya berarti menunjukkan semakin organiknya akun tersebut. Pada score overall nya ada 1,79 dan berwarna hijau yang dapat dikatakan bahwa yang terlibat dalam percakapan publik ini adalah manusia bukan robot. Akun atau aktor yang terlibat di dalam percakapan ini cukup beragam, mulai dari media daring lalu aktivis. Beberapa yang paling berpengaruh dan mendapat banyak retweet adalah media daring, @tengkudzul, @dandhywilaksono, @tsembiring, @amin_rais, @prastowo, @teddygusnaldi di mana semuanya adalah akun organik karena sangat sedikit ditemukan akun robot yang terlibat dalam perdebatan.

Kita menyadari bahwa saat ini kita tidak hanya menghadapi dunia nyata tetapi juga dunia digital, dimana dunia digital sama pentingnya dengan dunia nyata. Dalam penggunaannya media sosial melalui internet memungkinkan masyarakat untuk bertukar ide, gagasan, pikiran juga informasi sosial. Informasi sosial ini bermuatan mengenai masalah-masalah publik yang dapat mempengaruhi publik dalam menentukan sikap dan melakukan suatu tindakan politik. Melalui informasi sosial ini warga dapat memperjuangkan kepentingannya dengan bebas, tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah.

Informasi ini mendorong warga untuk sehari-hari, terlebih mengenai ketidakadilan dan sifatnya merugikan kepentingan umum. Warga digital yang sadar bisa menuntut hak-haknya secara maksimal. Bahkan dapat mengorganisir diri ketika mendapati kondisi dan situasi yang rumit. Dalam konteks ini gerakan sosial berbasis internet muncul ke permukaan demi memperjuangkan hak dan kepentingan warga di berbagai bidang. Kenaikan BPJS menjadi *headline* di berbagai media daring dan menjadi sorotan netizen khususnya di platform media online seperti Twitter.

Dari ratusan ribu percakapan di media sosial khususnya Twitter tentang kenaikan BPJS Kesehatan pada tahun 2020, munculnya satu jenis kewarganegaraan baru yang terefleksi dari protes warganet di ruang publik digital sebagai bagian dari upaya untuk menuntut pemenuhan hak (*claiming right*) atas layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Ketentuan itu ada dalam konstitusi kita, negara berkewajiban menyelenggarakan satu sistem jaminan sosial. Tindakan para warganet di ruang publik digital disebut tindakan kewarganegaraan

yang merupakan suatu upaya untuk mengklaim hak kesehatan mereka dan juga hal itu menunjukkan penguatan kesadaran public terhadap hak-hak mereka.

Seperti dikatakan oleh Fauzanafi (2016) bahwa kewarganegaraan digital tidak hanya sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dari perilaku etis yang ditentukan, tetapi sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di Internet dan dalam kegiatan sosial media. Kumpulan tindakan ini dipahami sebagai tindakan digital yang semua tindak tutur yang diucapkan melalui aktivitas online seperti blogging, olahpesan, email, tweeting, posting, menyukai, dan berkomentar.

4.1 Analisis Dampak Respon Warganet Mempengaruhi Pemberitaan di Media Arus Utama

Sejak Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Twitter pun langsung ramai dengan masyarakat yang protes. Suatu hal yang wajar jika masyarakat protes karena sebelumnya Mahkamah Agung sempat membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan namun kini dinaikkan lagi.

Isu kenaikan BPJS yang sampai trending di Twitter mempengaruhi pemberitaan di media arus utama. Beberapa dari media arus utama memberitakan isu kenaikan BPJS dengan sentiment yang negatif. Media CNNIndonesia pada hari Rabu 13 Mei 2020 dengan judul “Iuran BPJS Naik Lagi, Masyarakat Merasa Kena Prank

Jokowi”. Dalam artikel tersebut memuat pernyataan salah satu peserta mandiri kelas II BPJS Kesehatan, ia mengaku kecewa dengan prank Jokowi padahal ia sempat senang ketika MA membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Ia mengharapkan Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan yang maju mundur yang justru memberi ketidakpastian pada masyarakat.

Selain itu media arus utama lain yaitu dari Detik pada hari Rabu 13 Mei 2020 dengan judul “BPJS Kesehatan Naik Lagi, Warga Twitterland Meradang” berisi tentang beberapa cuitan warga Twitterland. Senada dengan Merdeka.com yang juga memberitakan pada Jumat 15 Mei 2020 dengan judul “Iuran BPJS Kesehatan Naik, AHY Sebut Rakyat Sudah jatuh Tertimpa Tangga”.